

Peran birokrasi dalam peningkatan mutu pendidikan di Indonesia

I'anutul Adhimah An-nuriyah

Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: ianatuladhimahannuriyah@gmail.com

Kata Kunci:

peran birokrasi; tantangan dan solusi; peningkatan mutu pendidikan

Keywords:

role of bureaucracy; challenges and solutions; improvement quality of education

ABSTRAK

Peran birokrasi dalam peningkatan mutu pendidikan di Indonesia. Peran birokrasi tidak hanya sebagai pengendali atau pengawas, tetapi juga sebagai fasilitator, motivator, dan inspirator. Melalui program pembinaan birokrasi pendidikan nasional yang profesional, birokrasi berupaya meningkatkan kemampuan dan kinerjanya untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Birokrasi dalam pendidikan melibatkan para pegawai pemerintah, guru, dan siswa dalam proses pembelajaran serta pengembangan mutu pendidikan. Tantangan yang dihadapi oleh peran birokrasi dalam peningkatan mutu pendidikan meliputi kurangnya sosialisasi, koordinasi yang kurang efektif, keterlibatan yang minim, kurangnya keterbukaan, dan inovasi dalam pengelolaan pendidikan.

Untuk mengatasi tantangan ini, birokrasi perlu menjadi lebih terbuka, tanggung jawab, profesional, partisipatif, inovatif, kreatif, dan adaptif dalam menghadapi perubahan di era globalisasi saat ini. Dengan pemahaman yang mendalam mengenai peran birokrasi, diharapkan dapat tercipta sistem pendidikan yang lebih efektif, efisien, dan berkualitas di Indonesia, sehingga masyarakat dapat meraih kesejahteraan melalui pendidikan yang unggul.

ABSTRACT

The role of bureaucracy in improving the quality of education in Indonesia. The role of bureaucracy is not only as a controller or supervisor, but also as a facilitator, motivator, and inspirer. Through a professional national education bureaucracy-building program, the bureaucracies strive to improve their ability and performance to the desired goals. The bureaucracy in education involves government officials, teachers, and students in the learning process as well as the development of quality education. The challenges faced by the role of bureaucracy in improving the quality of education include lack of socialization, less effective coordination, minimal involvement, lack of openness, and innovation in the management of education. To overcome these challenges, bureaucracies need to become more open, responsible, professional, participatory, innovative, creative, and adaptive in the face of change in today's globalized era. With a deep understanding of the role of bureaucracy, it is expected to create a more effective, efficient, and quality education system in Indonesia, so that people can well-being through superior education.

Pendahuluan

Pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan suatu negara, karena pendidikan memiliki peran strategis dalam menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu bersaing di era globalisasi. Di Indonesia, peran birokrasi dalam sistem pendidikan menjadi kunci utama dalam upaya peningkatan mutu



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

pendidikan. Birokrasi tidak hanya berperan sebagai pengendali atau pengawas, tetapi juga sebagai fasilitator, motivator, dan inspirator dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang kondusif untuk pertumbuhan dan perkembangan peserta didik.

Di era globalisasi dan modernisasi modern ini, ilmu pengetahuan dan teknologi mengalami kemajuan yang sangat cepat. Untuk mencapai hal ini, diperlukan sumber daya manusia yang berkualitas dan berkualitas tinggi. Peningkatan kualitas sumber daya manusia ini dapat dicapai melalui peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia. Pendidikan merupakan hal yang sangat penting bagi setiap orang karena dengan adanya pendidikan, seseorang akan hidup lebih baik.

Dalam dunia pendidikan, pengorganisasian merupakan suatu tatanan yang sangat penting untuk memudahkan fungsi dan proses pendidikan. Tidaklah mungkin memisahkan organisasi pendidikan dari birokrasi dalam menjalankan fungsinya. Pada dasarnya, birokrasi adalah alat yang berfungsi untuk menyediakan layanan publik, khususnya pendidikan di sekolah.

Dalam mengimplementasikan peningkatan mutu pendidikan, Standar Nasional Pendidikan, yang terdiri dari 8 standar, harus diikuti sebagai langkah pertama. Setelah sekolah memenuhi standar tersebut, langkah berikutnya adalah meningkatkan kualitas pendidikan dengan mengikuti standar tersebut dan tetap mempertimbangkan visi dan misi sekolah atau pendidikan. Ini akan menghasilkan hasil pendidikan yang berkualitas tinggi.

Dalam konteks ini, program pendidikan birokrasi nasional profesional adalah salah satu cara untuk meningkatkan kemampuan dan produktivitas birokrat dalam melaksanakan tugas. Ia berharap bahwa dengan memahami peran demokrasi dalam organisasi pendidikan, sistem pendidikan yang efektif, efisien, dan berkualitas tinggi dapat diciptakan. Namun, tantangan yang dihadapi demokrasi dalam mengejar peningkatan pembelajaran siswa tidaklah tidak signifikan; mereka berkisar dari sosialisasi yang agak tidak memadai dan koordinasi agak tidak efektif hingga inovasi yang agak kurang dalam pengajaran. Dengan pemahaman yang mendalam mengenai peran birokrasi dalam sistem pendidikan akan mengulas secara komprehensif mengenai peran birokrasi dalam peningkatan mutu pendidikan di Indonesia. Melalui analisis yang mendalam terhadap tantangan dan solusi yang dihadapi, diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai upaya yang perlu dilakukan untuk menciptakan sistem pendidikan yang unggul dan berdaya saing di era globalisasi saat ini.

Pembahasan

Hubungan Pengorganisasian dan Birokrasi dalam Dunia Pendidikan

Pengorganisasian merupakan tatanan yang penting dalam memperlancar fungsi dan proses pendidikan. Birokrasi, sebagai bagian dari pengorganisasian, berperan dalam memudahkan pelayanan publik di sekolah. Birokrasi dalam pendidikan melibatkan para pegawai pemerintah, guru, dan siswa dalam proses pembelajaran serta pengembangan mutu pendidikan.

Birokrasi merupakan sebagai organisasi pemerintah baik dalam pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang mana tugasnya menjalankan sebagai penyedia atau pelayanan jasa kepada masyarakatnya. Didalam sebuah organisasi juga baik organisasi swasta maupun dalam organisasi public salah satunya organisasi pemerintah di dalamnya juga terdapat sebuah kelompok-kelompok penting yang mana membentuk organisasi sehingga organisasi tersebut dapat berjalan atau berfungsi sesuai dengan mestinya. sedangkan, Birokrasi didalam pendidikan diartikan sebagai sistem organisasi dan administrasi yang mana didalamnya melibatkan para pegawai pemerintah, guru, dan siswa dalam proses pembelajaran dan pengembangan mutu pendidikann (Sarmila, Andi Tenri Sanna, 2021).

Sekolah melakukan akreditasi sebagai bagian dari Standar Nasional Pendidikan, yang terdiri dari delapan standar, yang dinilai berdasarkan unsur-unsur masing-masing elemen. Akreditasi mencakup visitasi dan pengisian data oleh asesor dari Badan Akreditasi Nasional. Hasil akreditasi lembaga pendidikan dapat menunjukkan proses manajemen layanan dan prestasi akademik dan non akademik. Ada korelasi yang signifikan antara skor akreditasi sekolah dan kinerja guru terhadap kualitas dan hasil belajar. Oleh karena itu, dikatakan bahwa sekolah dengan skor akreditasi yang lebih tinggi dan kinerja guru sebanding dengan kualitas hasil belajar dan pembelajaran di lembaga pendidikan. karena akreditasi akan melibatkan banyak sekolah memenuhi standar pemerintah.

Selain itu, ada keuntungan dari kegiatan akreditasi, yang menjadikan setiap tahapan dan proses penting untuk dilakukan secara optimal. Sekolah atau madrasah yang diakui dapat berfungsi sebagai acuan untuk pengembangan, mendorong lembaga untuk meningkatkan kualitasnya secara bertahap, mengidentifikasi lembaga untuk mendapatkan bantuan, investasi, dan donasi pemerintah, dan memfasilitasi pertukaran siswa dan mutasi guru di antara sekolah. Ini sebagai tanggapan atas kualitas pendidikan Indonesia yang masih rendah, seperti yang ditunjukkan oleh perolehan akreditasi. Sekolah atau madrasah adalah lembaga pendidikan formal yang diharapkan memiliki standar dan kualitas yang tinggi. Ini dapat dicapai dengan memaksimalkan peran lembaga penjaminan mutu dalam menjamin kualitas pendidikan yang diberikan (Dewi & Ali, 2020).

Peran Birokrasi dalam Peningkatan Mutu Pendidikan

Peran birokrasi dalam peningkatan mutu pendidikan di Indonesia sangat penting. Birokrasi tidak hanya berperan sebagai pengendali atau pengawas, tetapi juga sebagai fasilitator, motivator, dan inspirator. Melalui program pembinaan birokrasi pendidikan nasional yang profesional, birokrasi dapat meningkatkan kemampuan dan kinerjanya. Hal ini bertujuan untuk menghapus pendapat bahwa birokrasi sulit berubah karena sifatnya yang konservatif.

Dalam peran birokrasi sebagai aparat administratif, birokrasi bertanggung jawab untuk menentukan perkembangan dan kemajuan pendidikan, dan birokrasi ini telah diatur secara normatif dan mekanisme untuk mempertahankan struktur tersebut untuk menjamin tercapainya tujuan meningkatkan kualitas pendidikan. Dalam posisi ini, guru

bertindak sebagai aparat birokrasi yang menjalankan fungsi pendidikan dan pengajaran untuk tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Karena kepala sekolah memiliki posisi paling strategis di sekolah, mereka adalah pihak utama yang bertanggung jawab untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Karena ujung tombak dalam peningkatan kualitas pendidikan nasional dimulai dari seorang guru yang ideal yang sesuai dengan cita-cita dan gagasan pendidikan, maka diperlukan supervisor dan pengawas yang berkualitas untuk menghasilkan guru profesional. Pasal 8 Undang-undang No.14 tahun 2005 tentang guru/dosen menyatakan bahwa guru adalah pendidik profesional yang memiliki kualifikasi akademik, kesehatan jasmani dan rohani, serta sertifikasi pendidik untuk memastikan standar pendidikan yang tinggi. Akan tetapi pada kenyataannya, 65% guru tidak memenuhi standar nasional, seperti mengajar tidak sesuai dengan bidang keahliannya, sehingga hal tersebut berakibat pada kualitas pendidikan di sekolah. Disinilah peran kepala sekolah sangat diperlukan (Abd. Qadir Muslim & Tamim Mulloh, 2022).

Peran birokrasi dan partisipasi masyarakat dapat memiliki fungsi untuk mengontrol atau mengawasi pendidikan di Indonesia sehingga pelaksanaan dalam menjalani proses pendidikan di Indonesia dapat berjalan sesuai yang diinginkan. Dalam hal ini, untuk meningkatkan kemampuan dalam kinerja birokrasi pendidikan dapat dilaksanakan lewat program pembinaan birokrasi pendidikan nasional yang berprofesional, kegiatan ini dilaksanakan karena untuk menghapus pendapat-pendapat yang mengatakan bahwa birokrasi itu merupakan kelompok atau organisasi yang sangat sulit untuk berubah, mereka mengatakan seperti itu karena cenderung menjadi orang yang konservatif (cara mengungkapkan ide atau pikiran orang lain) dalam melaksanakan tugas.

Salah satu isu utama terkait pendidikan di Indonesia adalah peran birokrasi dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan. Peran birokrat dalam upaya peningkatan mutu pendidikan dapat dilihat dari dua sudut pandang yaitu desentralisasi dan otonomi sekolah. Yang mana dengan cara ini, birokrasi dapat memberikan dukungan dan peluang untuk pemerintah dan sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan. Dan solusinya Birokrasi ini juga harus melaksanakan pengawasan, evaluasi, dan pengembangan kapasitas bagi pemerintah dan juga sekolah yang mana tujuannya hanya untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia (Nurkholis, 2013).

Tantangan dan Solusi Peran Birokrasi dalam Peningkatan Mutu Pendidikan

Realita telah menunjukkan bahwa membangun dan mengembangkan kembali Lembaga pendidikan yang mampu merespons dan menjawab tantangan modernitas dan globalisasi bukanlah tugas yang mudah dan sederhana. Dengan demikian, menghadapi banyak masalah, baik internal maupun eksternal. Banyak orang juga menghadapi konflik antara tradisi dan modernitas, atau antara integrasi dan dikotomi keilmuan. Bentuk keilmuan yang dikembangkan dan kesiapan sumber daya manusia seperti guru, dosen, siswa, dan administrator juga merupakan faktor yang menghambat pengembangan lembaga (Rasyidi, 2003).

Meskipun memiliki peran yang vital, peran birokrasi dalam peningkatan mutu pendidikan itu masih menghadapi berbagai tantangan dan masalah ada beberapa yang terkait diantaranya yaitu :

1. Kurangnya sosialisasi dan pemahaman sebagai acuan mutu pendidikan.
2. Kurangnya koordinasi dan kekuatan antara birokrasi pusat dan daerah dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pendidikan.
3. Kurangnya keterlibatan termasuk guru, orang tua, dan siswa, dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan pendidikan.
4. Kurangnya keterbukaan dan tanggung jawab dalam pengelolaan sumber daya, anggaran, dan program pendidikan.
5. Kurangnya inovasi dan kreativitas dalam mengembangkan kurikulum, metode pembelajaran, dan evaluasi pendidikan.

Oleh karena itu, maka solusinya kita sebagai penerus bangsa perlu adanya perubahan peningkatan mutu pendidikan. Birokrasi ini harus menjadi lebih terbuka, tanggung jawab, dan profesional dalam melayani kepentingan pendidikan. Birokrasi juga harus menjadi lebih partisipatif, dan kebersamaan dalam berinteraksi dengan pihak-pihak terkait pendidikan. Birokrasi juga harus menjadi lebih inovatif, kreatif, dan adaptif dalam menghadapi tantangan dan perubahan di era globalisasi saat ini.

Dengan demikian, peran birokrasi dalam peningkatan mutu pendidikan bukanlah sebagai pengendali, pengawas, atau penghambat, melainkan sebagai fasilitator, motivator, dan inspirator. Birokrasi harus mampu menciptakan kondisi yang kondusif bagi pemerintah daerah, sekolah, dan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dan berkontribusi positif dalam meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia.

Jadi dapat disimpulkan bahwa pada akhirnya, peran birokrasi dalam lembaga pendidikan menjadi pusat model implementasi untuk satuan dan jenjang pendidikan. Di sini, satuan dan jenjang pendidikan tersebut memerlukan pembaharuan manajemen. Untuk menyelesaikan masalah, proses inovasi atau pembaharuan manajemen diperlukan. Dalam upaya meningkatkan kesetaraan pendidikan, peningkatan kualitas, peningkatan efektivitas dan efisiensi, serta relevansi, masalah tersebut dapat muncul. Tujuannya adalah agar inovasi yang dibuat dapat diterima, digunakan, dan dipelajari untuk memperbaiki dan memecahkan masalah pendidikan di Indonesia.

Maka dapat menyarankan beberapa hal yang bisa dianggap sangat diperlukan mengenai peran birokrasi ini dalam peningkatan mutu pendidikan di Indonesia maka perlunya meningkatkan fungsi birokrasi dalam sekolah untuk meningkatkan mutu pendidikan.

Kesimpulan

Pengorganisasian merupakan tatanan yang penting dalam memperlancar fungsi dan proses pendidikan. Birokrasi, sebagai bagian dari pengorganisasian, berperan dalam memudahkan pelayanan publik di sekolah. Birokrasi dalam pendidikan melibatkan para

pegawai pemerintah, guru, dan siswa dalam proses pembelajaran serta pengembangan mutu pendidikan.

Peran birokrasi dalam peningkatan mutu pendidikan di Indonesia sangat penting. Birokrasi tidak hanya berperan sebagai pengendali atau pengawas, tetapi juga sebagai fasilitator, motivator, dan inspirator. Melalui program pembinaan birokrasi pendidikan nasional yang profesional, birokrasi dapat meningkatkan kemampuan dan kinerjanya. Hal ini bertujuan untuk menghapus pendapat bahwa birokrasi sulit berubah karena sifatnya yang konservatif.

Realita telah menunjukkan bahwa membangun dan mengembangkan kembali Lembaga pendidikan yang mampu merespons dan menjawab tantangan modernitas dan globalisasi bukanlah tugas yang mudah dan sederhana. Dengan demikian, menghadapi banyak masalah, baik internal maupun eksternal. Solusinya kita sebagai penerus bangsa perlu adanya perubahan peningkatan mutu pendidikan. Birokrasi ini harus menjadi lebih terbuka, tanggung jawab, dan profesional dalam melayani kepentingan pendidikan.

Daftar Pustaka

- Abd. Qadir Muslim, & Tamim Mulloh. (2022). Analisis Kebijakan Program Guru Penggerak Sebagai Upaya Regenerasi Supervisor Pendidikan Yang Berkualitas Di Indonesia. *Journal Publicuho*, 5(3), 790–801.
<https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i3.28>
- Dewi, P. R., & Ali, N. (2020). Peningkatan Skor Akreditasi Madrasah melalui Lembaga Penjaminan Mutu. *J-Mpi*, 5(1), 44–54. <https://doi.org/10.18860/jmpi.v5i1.9046>
- Nurkholis. (2013). Potret Birokrasi Pendidikan Di Indonesia. *JMP*, 2, NO 1.
- Rasyidi, A. W. (2003). Manajemen Mutu Pembelajaran Bahasa Arab Di Madrasah Sebagai Pilar Pengembangan Perguruan Tinggi Islam Di Indonesia. *Manajemen Mutu Bahasa Arab*, 1–23.
- Sarmila, Andi Tenri Sanna, S. B. (2021). Peran Birokrasi Dalam Kebijakan Peningkatan Mutu. *MAPPESONA Jurnal Mahasiswa Manajemen Pendidikan Islam*, 1, 12–21.
<https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj7mKvqr6f4AhUXRmwGHfVVA9cQFnoECC8QAQ&url=http%3A%2F%2Fjurnal.iain-bone.ac.id%2Findex.php%2Fmappesona%2Farticle%2Fdownload%2F1769%2F942&u sg=AOvVaw3cRVGEBFqYWuYhXP78YP>